

Analisis Peran dan Dampak Lembaga Keuangan Internasional terhadap Kemandirian Ekonomi Negara Berkembang

Junika Simanungkalit, Dahlya Panjaitan, Freshy Simanjuntak, Prischilla Sitinjak, Hasyim

Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

junikasimanungkalit933@gmail.com, dahlyapanjaitan174@gmail.com,
freshtysimanjuntak@gmail.com, sitinjakprischilla@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran serta dampak lembaga keuangan internasional seperti *International Monetary Fund (IMF)*, Bank Dunia, dan *Asian Development Bank (ADB)* terhadap kemandirian ekonomi negara berkembang, dengan fokus pada kasus Indonesia. Dalam konteks globalisasi, lembaga keuangan internasional berfungsi sebagai penyedia bantuan finansial sekaligus pengarah kebijakan ekonomi melalui program reformasi struktural. Namun, intervensi tersebut sering kali menimbulkan dilema antara stabilitas makroekonomi jangka pendek dan kemandirian ekonomi jangka panjang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur terhadap berbagai sumber empiris dan teoretis dari periode 2019–2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran lembaga keuangan internasional tidak selalu bersifat negatif; efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas institusi nasional dan arah kebijakan domestik. Indonesia, misalnya, berhasil memperbaiki stabilitas fiskal pasca-krisis 1998, tetapi masih menghadapi tantangan dalam mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri dan meningkatkan daya saing industri nasional.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa kemandirian ekonomi dapat tercapai apabila negara mampu memanfaatkan bantuan internasional sebagai sarana penguatan kapasitas produksi domestik dan inovasi kebijakan fiskal. Dengan demikian, kerja sama dengan lembaga keuangan internasional seharusnya diposisikan sebagai kemitraan strategis yang saling menguntungkan, bukan sebagai bentuk subordinasi ekonomi.

Kata kunci: Lembaga Keuangan Internasional, Kemandirian Ekonomi, Imf, Bank Dunia, ADB, Negara Berkembang

ABSTRACT

This study aims to analyze the role and impact of international financial institutions such as the International Monetary Fund (IMF), the World Bank, and the Asian Development Bank (ADB) on the economic independence of developing countries, focusing on the case of Indonesia. In the context of globalization, international financial institutions function as providers of financial assistance as well as policy advisors through structural reform

programs. However, such interventions often create a dilemma between short-term macroeconomic stability and long-term economic independence.

This research employs a qualitative approach based on a literature review of various empirical and theoretical sources from the 2019–2024 period. The findings indicate that the role of international financial institutions is not always negative; their effectiveness largely depends on national institutional capacity and the direction of domestic policies. Indonesia, for instance, managed to improve fiscal stability after the 1998 crisis but still faces challenges in reducing dependence on foreign loans and enhancing the competitiveness of its national industries.

The results of this study emphasize that economic independence can be achieved when a country is able to utilize international assistance as a means to strengthen domestic production capacity and foster fiscal policy innovation. Therefore, cooperation with international financial institutions should be positioned as a mutually beneficial strategic partnership rather than a form of economic subordination.

Keywords: *international financial institutions, economic independence, IMF, World Bank, ADB, developing countries*

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi ekonomi yang semakin terintegrasi, lembaga keuangan internasional (LKI) seperti *International Monetary Fund (IMF)*, *World Bank*, dan *Asian Development Bank (ADB)* memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan arah kebijakan ekonomi di negara-negara berkembang. Lembaga-lembaga tersebut tidak hanya menyediakan dukungan finansial bagi negara yang menghadapi krisis ekonomi, defisit anggaran, atau tekanan neraca pembayaran, tetapi juga menyertakan serangkaian kebijakan struktural yang wajib diimplementasikan oleh negara penerima (Mandal, 2022). Dengan demikian, LKI berfungsi ganda sebagai penyedia bantuan finansial sekaligus agen perubahan kebijakan ekonomi nasional.

Indonesia menjadi salah satu contoh yang paling sering dibahas dalam literatur

mengenai intervensi eksternal. Bantuan IMF pada masa krisis moneter 1998 disertai dengan penerapan *Structural Adjustment Program (SAP)* yang mencakup privatisasi BUMN, deregulasi sektor keuangan, serta liberalisasi perdagangan (Pratama, Y., & Yuliana, 2023). Kebijakan ini terbukti mampu menstabilkan kondisi makroekonomi Indonesia dalam jangka pendek, termasuk menekan inflasi serta memperbaiki struktur perbankan. Namun, beberapa penelitian mencatat bahwa ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri memperlemah daya saing industri domestik, terutama UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional (Hidayat, R., & Sari, 2022).

Fenomena serupa juga terjadi di sejumlah negara Afrika seperti Ghana dan Kenya. Ghana menerima bantuan IMF dalam bentuk *Extended Credit Facility (ECF)* untuk mengatasi pelemahan fiskal dan menurunnya nilai tukar. Walaupun kebijakan tersebut berhasil memulihkan stabilitas makro, pengetatan fiskal justru

meningkatkan pengangguran serta menghambat pertumbuhan sektor produktif nasional (Owusu, G., & Mensah, 2022). Demikian pula, Kenya mengalami stagnasi pada sektor manufaktur akibat kebijakan penghematan yang menekan belanja publik, sehingga tujuan jangka panjang pembangunan ekonominya tidak tercapai.

Sebaliknya, terdapat pula negara berkembang yang mampu memanfaatkan bantuan LKI secara efektif. Vietnam sering disebut sebagai contoh keberhasilan karena mampu menerapkan strategi *selective borrowing*. Pemerintah Vietnam mengarahkan pinjaman dari ADB dan Bank Dunia ke sektor-sektor produktif seperti pertanian modern, logistik, dan energi terbarukan, sehingga mendorong peningkatan kapasitas ekspor serta memperkuat kemandirian fiskal nasional (Nguyen, T., Pham, V., & Le, 2023). Negara-negara seperti Rwanda dan Bangladesh juga menunjukkan keberhasilan yang sama. Rwanda, misalnya, menggunakan bantuan Bank Dunia untuk memperkuat tata kelola publik serta meningkatkan efisiensi birokrasi, yang kemudian membantu pertumbuhan ekonomi pasca-konflik. Bangladesh memfokuskan pinjaman ADB ke sektor industri tekstil dan energi, sehingga berhasil mengurangi ketergantungan terhadap impor dan meningkatkan pendapatan negara.

Variasi hasil tersebut menunjukkan bahwa efektivitas bantuan LKI sangat dipengaruhi oleh kapasitas negara penerima. Ketika negara memiliki tata kelola yang kuat, visi pembangunan yang jelas, serta kemampuan untuk mempertahankan kontrol terhadap arah

kebijakan nasional, bantuan internasional dapat menjadi katalisator pembangunan. Namun, ketika kelembagaan domestik lemah, intervensi LKI justru berpotensi memperdalam ketergantungan fiskal dan mempersempit ruang gerak kebijakan nasional.

Kemandirian ekonomi menjadi sangat penting dalam konteks negara berkembang yang rentan terhadap fluktuasi global. (Nasution, 2024a) mendefinisikan kemandirian ekonomi sebagai kemampuan negara untuk mengelola sumber daya secara optimal tanpa ketergantungan berlebihan pada pendanaan eksternal. Oleh karena itu, kerja sama dengan lembaga keuangan internasional harus ditempatkan dalam kerangka mutual benefit, bukan dominasi satu pihak terhadap pihak lain.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, dapat memanfaatkan kerja sama internasional tanpa mengorbankan kemandirian ekonomi jangka panjang. Melalui kajian teori ketergantungan, teori kelembagaan, dan teori pembangunan nasional, penelitian ini menyajikan analisis mendalam mengenai bagaimana negara dapat menyeimbangkan kebutuhan bantuan eksternal dengan upaya memperkuat kapasitas domestik guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berdaulat.

KAJIAN TEORI

Teori Ketergantungan (Dependency Theory)

Teori ketergantungan merupakan aliran pemikiran yang berkembang pada

tahun 1950–1970-an dan dipelopori oleh para ekonom Amerika Latin seperti Raul Prebisch, Andre Gunder Frank, Theotonio Dos Santos, dan Fernando Henrique Cardoso. Inti dari teori ini adalah menjelaskan bahwa struktur ekonomi global bersifat tidak seimbang, di mana negara maju (core countries) menguasai teknologi, modal, dan struktur perdagangan internasional, sementara negara berkembang (periphery) hanya berperan sebagai pemasok komoditas mentah dan pasar bagi produk negara maju. Akibatnya, negara berkembang sulit keluar dari posisi subordinat karena arah pembangunan ekonominya dikendalikan oleh kekuatan eksternal.

Dalam konteks hubungan dengan lembaga keuangan internasional, teori ini menjelaskan bahwa IMF dan Bank Dunia sering kali memperkuat pola ketergantungan struktural. (Rahman, 2023) menyatakan bahwa standar kebijakan yang ditetapkan lembaga tersebut tidak selalu relevan dengan kondisi domestik negara berkembang, namun tetap harus diikuti sebagai syarat pencairan pinjaman. Hal ini menyebabkan negara berkembang cenderung mengikuti agenda global yang tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan internal.

Dalam praktiknya, berbagai program pinjaman IMF disertai syarat seperti austerity measures, privatisasi, liberalisasi perdagangan, dan deregulasi pasar. (Yusuf, A., & Tamba, 2022) menemukan bahwa kebijakan ini dapat menekan belanja sosial pemerintah dan memperlemah pertumbuhan sektor riil, sehingga negara berkembang sulit keluar dari lingkaran ketergantungan fiskal.

Contoh yang jelas tampak pada Indonesia pasca-krisis 1998, ketika stabilitas makro memang berhasil dipulihkan, tetapi liberalisasi cepat menyebabkan melemahnya industri domestik, meningkatnya impor, dan berkurangnya kontrol negara terhadap aset strategis.

Namun, para pemikir modern menilai teori ketergantungan tidak selalu harus dipahami secara negatif. (Silalahi, M., & Prasetyo, n.d.) menekankan bahwa ketergantungan dapat dikelola menjadi hubungan simbiosis apabila negara penerima memiliki kapasitas institusional kuat dan mampu menegosiasikan ulang syarat pinjaman agar selaras dengan agenda pembangunan nasional. Dalam kondisi seperti ini, bantuan internasional dapat menjadi katalisator pembangunan, bukan sekadar beban struktural yang memperdalam ketergantungan.

Teori Kelembagaan (Institutional Theory)

Teori kelembagaan modern dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti W. Richard Scott, John W. Meyer, dan Brian Rowan pada tahun 1970–1980-an. Mereka berpendapat bahwa perilaku organisasi, termasuk negara, dipengaruhi oleh aturan formal, norma sosial, budaya institusional, serta tekanan legitimasi dari lingkungan eksternal. Teori ini kemudian diperkuat oleh pemikiran Douglass C. North (1990) yang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi jangka panjang sangat ditentukan oleh kualitas institusi, bukan hanya ketersediaan modal atau sumber daya alam.

Dalam konteks hubungan dengan lembaga keuangan internasional, teori

kelembagaan memberi penjelasan bahwa efektivitas program IMF, Bank Dunia, dan ADB sangat bergantung pada kemampuan institusi domestik dalam menyerap dan mengelola bantuan tersebut. Negara dengan tata kelola yang kuat, birokrasi yang efisien, serta koordinasi antarsektor yang solid akan mampu memanfaatkan bantuan internasional sebagai instrumen pembangunan. Sebaliknya, negara dengan institusi lemah berisiko gagal mengimplementasikan program secara efektif sehingga bantuan yang diterima tidak memberikan dampak signifikan atau bahkan memperburuk ketergantungan.

(Sutopo, D., & Nugraha, 2023) mencontohkan bahwa beberapa program reformasi fiskal dan birokrasi di Indonesia tidak berjalan optimal karena resistensi politik dan lemahnya koordinasi antarlembaga. Hal ini membuat tujuan program yang dirancang Bank Dunia tidak tercapai sepenuhnya. Sebaliknya, Vietnam menunjukkan keberhasilan dengan memanfaatkan bantuan internasional untuk memperkuat desentralisasi fiskal dan mendorong pertumbuhan industri manufaktur ekspor. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kualitas lembaga domestik sangat menentukan apakah bantuan internasional akan menjadi keuntungan atau justru beban.

Lebih lanjut, teori kelembagaan memberikan pandangan bahwa kemandirian ekonomi tidak diukur dari ketiadaan utang, tetapi dari sejauh mana negara mampu mengendalikan arah kebijakan pembangunan dan memanfaatkan struktur kebijakan global untuk kepentingan domestik (Rahmawati, 2022). Negara dengan tata kelola kuat dapat

memanfaatkan bantuan luar negeri sebagai instrumen strategis yang mendukung pembangunan jangka panjang.

Teori Pembangunan Nasional dan Kemandirian Ekonomi

Teori pembangunan nasional yang dipengaruhi oleh pemikiran Andre Gunder Frank menekankan bahwa negara harus mampu mengelola sumber daya ekonomi, sosial, dan institusional secara mandiri untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Teori ini menekankan pentingnya kontrol negara atas produksi, distribusi, teknologi, dan kebijakan strategis agar pembangunan tidak terjebak dalam agenda eksternal yang merugikan.

(Nasution, 2024b) menyatakan bahwa kemandirian ekonomi merupakan pilar utama pembangunan nasional yang berkelanjutan. Negara yang terlalu bergantung pada lembaga keuangan internasional cenderung mengikuti rekomendasi jangka pendek yang belum tentu sesuai dengan karakteristik ekonominya. Oleh karena itu, pembangunan nasional harus diarahkan pada strategi yang memperkuat sektor produktif, meningkatkan inovasi teknologi lokal, serta memperluas kapasitas industri dalam negeri.

Dalam konteks ini, lembaga keuangan internasional seharusnya diposisikan sebagai mitra strategis, bukan pengarah kebijakan. Menurut (Herlina, D., & Saputra, 2021), kerja sama dengan IMF atau Bank Dunia akan memberikan manfaat besar jika diarahkan untuk memperkuat kapasitas produksi dalam negeri, membuka lapangan kerja, meningkatkan daya saing ekspor, serta memperkuat struktur ekonomi

nasional. Dengan demikian, strategi pembangunan nasional harus berfokus pada *capacity building* dan penguatan teknologi lokal agar negara berkembang dapat meminimalkan ketergantungan pada sumber daya eksternal.

Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa dampak lembaga keuangan internasional terhadap kemandirian ekonomi negara berkembang sangat beragam. (Hidayat, R., & Sari, 2022) menemukan bahwa bantuan IMF pasca-krisis 1998 berhasil menstabilkan kurs dan inflasi di Indonesia, tetapi memberikan dampak negatif terhadap UMKM karena meningkatnya biaya produksi dan melemahnya proteksi industri domestik.

Studi oleh (Nguyen, T., Pham, V., & Le, 2023) di Vietnam menunjukkan bahwa pinjaman ADB yang diarahkan pada infrastruktur produktif mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kemandirian fiskal. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas bantuan internasional sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan domestik dan kualitas manajemen pemerintah.

(Owusu, G., & Mensah, 2022) menemukan bahwa negara-negara Afrika Barat mengalami pelemahan ruang fiskal akibat ketergantungan pada bantuan IMF, sehingga pemerintah kesulitan membiayai program sosial. Temuan serupa di Indonesia dikemukakan oleh (Pratama, Y., & Yuliana, 2023), yang menjelaskan bahwa utang luar negeri masih menjadi beban pembangunan akibat lemahnya inovasi kebijakan fiskal.

Namun, (Silalahi, M., & Prasetyo, n.d.) menegaskan bahwa bantuan internasional dapat membawa manfaat apabila negara memiliki policy ownership yang kuat. Ketika negara mampu mengendalikan implementasi program bantuan agar tetap sesuai dengan visi pembangunan nasional, bantuan tersebut dapat memberikan dampak positif jangka panjang.

Secara keseluruhan, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dampak LKI sangat bergantung pada kapasitas internal negara. Untuk mencapai pembangunan yang berdaulat, negara berkembang perlu menyeimbangkan antara penerimaan bantuan internasional dan penguatan struktur ekonomi domestik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan ADB memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan arah kebijakan fiskal negara berkembang, termasuk Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (2024), sekitar 23% pembiayaan APBN Indonesia pada tahun 2023 masih bergantung pada pinjaman luar negeri, dengan porsi terbesar berasal dari skema kerja sama multilateral dengan Bank Dunia dan ADB. Meskipun rasio utang terhadap PDB masih berada pada level aman, yaitu 38%, kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada pendanaan eksternal masih menjadi pilar penting pembiayaan negara.

Bantuan IMF setelah krisis 1998 memberi dampak positif dalam stabilisasi ekonomi Indonesia, khususnya melalui penurunan inflasi, pemulihan sektor perbankan, serta restrukturisasi fiskal (Hidayat, R., & Sari, 2022). Namun, syarat reformasi yang menyertai bantuan tersebut menimbulkan efek jangka panjang berupa liberalisasi ekonomi yang luas, privatisasi aset negara, serta berkurangnya kontrol pemerintah terhadap sektor strategis. Hal ini memperlihatkan bahwa intervensi IMF tidak hanya memberikan solusi jangka pendek, tetapi juga membentuk ulang struktur ekonomi nasional.

Fenomena serupa juga terjadi di Ghana, yang menerima paket penyesuaian struktural IMF. Intervensi tersebut berhasil menstabilkan nilai tukar, tetapi kebijakan penghematan yang diterapkan memperlemah kemampuan negara dalam mempertahankan industri lokal karena pemotongan belanja publik dan penghapusan subsidi produksi (Owusu, G., & Mensah, 2022). Dampak ini menggambarkan dilema LKI: stabilitas makro tercapai, namun kapasitas produksi domestik melemah.

Sebaliknya, Vietnam menunjukkan keberhasilan signifikan dalam memanfaatkan bantuan internasional. Temuan (Al Khanbashi, Salim, & Khanbashi, 2024) membuktikan bahwa Vietnam menerapkan strategi *selective borrowing*, yaitu memilih pinjaman dari ADB dan Bank Dunia hanya untuk sektor produktif seperti pertanian modern, energi terbarukan, dan industri manufaktur. Kebijakan ini memperkuat basis fiskal serta meningkatkan kemandirian ekonomi melalui peningkatan kapasitas produksi

dalam negeri. Vietnam menjadi bukti bahwa keberhasilan bermitra dengan LKI bergantung pada kualitas kebijakan domestik.

Temuan umum penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas bantuan dari LKI dipengaruhi secara signifikan oleh kualitas tata kelola institusi. Negara dengan birokrasi kuat, transparan, serta akuntabilitas tinggi mampu memaksimalkan manfaat bantuan dan meminimalkan efek samping kebijakan penyesuaian. Sebaliknya, negara dengan institusi lemah cenderung terjebak dalam ketergantungan jangka panjang, reformasi ekonomi yang tidak sesuai kebutuhan, dan penurunan ruang fiskal (Silalahi, M., & Prasetyo, n.d.).

Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini menegaskan bahwa peran lembaga keuangan internasional (IMF, Bank Dunia, dan ADB) tidak hanya terlihat dari aliran dana yang disalurkan, tetapi juga dari pengaruhnya terhadap struktur kebijakan, tata kelola pemerintahan, dan arah pembangunan nasional. Pada banyak kasus, dampak terbesar LKI justru bukan pada pinjamannya, tetapi pada kebijakan yang wajib dijalankan oleh negara penerima.

Dalam konteks Indonesia, keterlibatan IMF pada krisis 1998 merupakan titik penting ketika kebijakan-fiskal dan struktur pasar domestik mengalami perubahan mendasar. Program penyesuaian struktural (Structural Adjustment Program) yang diwajibkan IMF meliputi deregulasi perbankan, pencabutan subsidi, liberalisasi perdagangan, hingga privatisasi. Reformasi

ini memang memperbaiki stabilitas makro, tetapi juga mengurangi kapasitas negara dalam mengendalikan sektor strategis.

Jika dibandingkan dengan Ghana—yang menghadapi tantangan serupa—kebijakan pengetatan anggaran (fiscal austerity) berdampak langsung pada sektor produksi lokal karena pemerintah kehilangan kemampuan untuk memberikan insentif pada sektor unggulan. Kedua negara ini menunjukkan kesamaan bahwa LKI sering berfokus pada stabilitas jangka pendek, namun tidak selalu memperhatikan kelangsungan kapasitas produksi domestik.

Sebaliknya, keberhasilan Vietnam menunjukkan bahwa efektivitas bantuan internasional sangat bergantung pada bagaimana negara penerima menempatkan diri dalam hubungan tersebut. Vietnam tidak mengikuti seluruh syarat LKI secara mentah, tetapi melakukan seleksi kebijakan, menyelaraskan pinjaman dengan agenda nasional, serta memperkuat institusi negara sebelum menerima bantuan bersyarat. Pendekatan ini membuat Vietnam tidak larut dalam ketergantungan, melainkan menjadikan LKI sebagai mitra pembangunan.

Analisis ini menunjukkan bahwa hubungan dengan LKI bukan persoalan menerima atau menolak bantuan, tetapi persoalan posisi tawar, kapasitas tata kelola, dan kemampuan negara untuk menjaga kedaulatan kebijakan. Negara dengan kapasitas institusi kuat dapat menjadikan pinjaman luar negeri sebagai alat akselerasi pembangunan. Namun, negara dengan kelembagaan lemah justru rentan terhadap tekanan kebijakan eksternal

dan mudah masuk ke dalam siklus ketergantungan fiskal.

Oleh karena itu, hubungan negara berkembang dengan LKI memiliki dua sisi:

- Kontributif, ketika bantuan digunakan secara selektif, diarahkan ke sektor produktif, dan didukung tata kelola yang kuat.
- Membebani, ketika bantuan bersyarat tidak sesuai kebutuhan nasional, kapasitas produksi domestik melemah, dan negara tidak memiliki kontrol atas kebijakan ekonomi.

Dengan demikian, inti pembahasan penelitian ini adalah bahwa efektivitas keterlibatan LKI sangat dipengaruhi oleh kualitas institusi domestik, arah kebijakan nasional, serta kemampuan negara untuk menegosiasikan dan mengendalikan agenda pembangunan. LKI dapat menjadi katalis pembangunan atau sumber ketergantungan bergantung pada bagaimana negara mengelola hubungan tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang sudah dijelaskan sebelumnya, lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan ADB punya pengaruh besar terhadap arah dan pola pembangunan ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia. Mereka sering berperan dalam memberikan bantuan finansial, dukungan teknis, serta program reformasi struktural yang bertujuan menjaga stabilitas ekonomi makro. Namun, di balik manfaatnya, keterlibatan lembaga-lembaga ini juga membuka potensi ketergantungan ekonomi, terutama ketika

kebijakan yang disarankan tidak selaras dengan kebutuhan domestik.

Kemandirian ekonomi pada dasarnya bukan berarti negara harus menutup diri dari kerja sama global, melainkan kemampuan untuk mengontrol arah kebijakan fiskal, moneter, dan pembangunan sesuai dengan visi nasional. Indonesia, misalnya, sudah menunjukkan kemajuan signifikan pasca-krisis 1998 dengan memperkuat sistem keuangan dan menata kembali manajemen utang luar negeri. Tapi, tantangan tetap ada — terutama soal diversifikasi ekonomi, ketergantungan pada impor bahan baku, dan rendahnya kemandirian industri nasional.

Dengan kata lain, dampak lembaga keuangan internasional bisa positif atau negatif tergantung pada bagaimana negara penerima mengelola bantuan dan menentukan posisi tawar dalam kerja sama internasional. Semakin kuat institusi dalam negeri dan arah kebijakan nasionalnya, semakin besar peluang bantuan itu bisa jadi alat dorong pembangunan, bukan alat kendali dari luar.

Saran

Pemerintah Indonesia sebaiknya memperkuat kapasitas kelembagaan dalam mengelola bantuan luar negeri agar tidak menimbulkan ketergantungan jangka panjang. Dana dari lembaga keuangan internasional perlu diarahkan ke sektor produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan seperti industri, pertanian, dan energi terbarukan. Selain itu, posisi tawar Indonesia dalam negosiasi internasional harus diperkuat dengan strategi dan data ekonomi yang matang agar

setiap kerja sama tetap berpihak pada kepentingan nasional. Dengan kebijakan yang terencana dan pengawasan yang kuat, bantuan internasional dapat menjadi alat pendukung kemandirian ekonomi, bukan sumber ketergantungan baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Khanbashi, Aadil, Salim, Aadil, & Khanbashi, Al. (2024). Proactive Classroom Management: Key Principles for Enhanced Learning. *Journal of Education and Human Development*, 13(2), 2334–2978. <https://doi.org/10.15640/jehd.v13n2a7>
- Herlina, D., & Saputra, R. (2021). Penguatan kapasitas produksi dalam pembangunan nasional. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Nasional*, 9(1), 45–60.
- Hidayat, R., & Sari, M. (2022). Dampak bantuan IMF terhadap stabilitas makroekonomi Indonesia pascakrisis 1998. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(2), 112–125.
- Mandal, S. (2022). International financial institutions and economic policy in developing countries. *Global Economic Review*, 51(3), 237–254.
- Nasution, A. (2024a). Kemandirian ekonomi sebagai pilar pembangunan nasional berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan Indonesia*, 18(1), 1–15.
- Nasution, A. (2024b). Kemandirian ekonomi sebagai pilar pembangunan nasional berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan Indonesia*, 18(11–15.).
- Nguyen, T., Pham, V., & Le, H. (2023). Strategic utilization of multilateral loans for economic transformation: Evidence from Vietnam. *Asian*

- Development Policy Review*, 11(2), 98–115.
- Owusu, G., & Mensah, F. (2022). IMF fiscal interventions and socio-economic implications in West Africa. *Journal of African Economic Studies*, 7(4), 201–219.
- Pratama, Y., & Yuliana, S. (2023). Dampak pinjaman luar negeri terhadap keberlanjutan fiskal Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(3), 67–80.
- Rahman, F. (2023). Dependency theory and the influence of global financial institutions. *International Journal of Development Studies*, 19(1), 55–70.
- Rahmawati, L. (2022). Tata kelola kelembagaan sebagai faktor penentu kemandirian fiskal. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 32–145.
- Silalahi, M., & Prasetyo, A. (n.d.). Institutional reforms and development outcomes in developing countries. *Journal of Governance and Development*, 6(1), 22–40.
- Sutopo, D., & Nugraha, R. (2023). Efektivitas bantuan Bank Dunia dalam reformasi birokrasi di Indonesia. *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 5(2), 150–168.
- Yusuf, A., & Tamba, M. (2022). Austerity policies and their impact on real economic sectors in developing nations. *Journal of International Economics and Policy*, 8(4), 77–93.